



**Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya**

Pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan dengan baik oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya maupun Anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

Pelaksanaan SHEK dilakukan secara lintas sektor, dimulai dari penguatan perencanaan daerah yang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga mendampingi penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD di tingkat provinsi dan kabupaten. Dalam bidang kesehatan, BP3OKP berperan dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan RSUD dan mendorong program layanan kesehatan inovatif (*Quick Wins* RAPPP). Pada bidang pendidikan, pendampingan dilakukan terhadap OPD/Dinas terkait dalam hal persiapan hingga pengimplementasian program afirmasi seperti Sekolah Sepanjang Hari (SSH), sekolah berpola asrama, dan wajib belajar 13 tahun agar selaras dengan kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Sementara itu, dalam bidang produktivitas, koordinasi dilakukan dengan pemangku kepentingan pariwisata dan transportasi udara untuk memperkuat konektivitas ekonomi.

BP3OKP juga melaksanakan audiensi dan kerja sama lintas kelembagaan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mendorong kolaborasi dalam pengawasan tata kelola pemerintahan. Seluruh rangkaian pelaksanaan SHEK ini tidak hanya memperkuat integrasi program dan penghindaran tumpang tindih antar OPD, tetapi juga memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus sehingga, pembangunan di Papua Barat Daya dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

# Kegiatan-Kegiatan Strategis





# PAPUA SEHAT



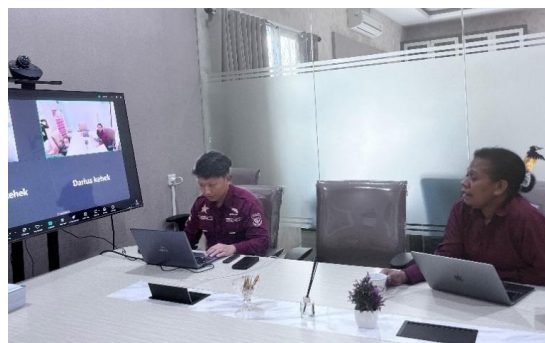
Pada tanggal **14 Mei 2025** di Aula RSU Kelas D Pratama Kabupaten Tamberauw, BP3OKP PBD diundang dan terlibat dalam kegiatan **Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) Tahun 2025 Kabupaten Tamberauw**. Pokja Sehat BPP Papua Barat Daya berkesempatan memberikan materi pada Rapat Kerja kesehatan Daerah mengenai proses Percepatan Pembangunan Bidang kesehatan dalam Rangka Otonomi Khusus Papua. Pada kesempatan tersebut, **materi yang diberikan ditujukan bagi daerah agar bertindak efisien dan efektif serta memanfaatkan setiap penganggaran yang berasal dari semua sumber sebagai penerimaan dalam rangka OTSUS dan menghindari perencanaan program yang tidak dapat ditentukan outputnya serta tidak mendongkrak nilai pada Indikator misi Sehat.**



Pada tanggal **16 Mei 2025** di Kompleks RSUD Kabupaten Raja Ampat, BP3OKP PBD diundang dan terlibat dalam kegiatan **Groundbreaking RSUD Kabupaten Raja Ampat**. *Groundbreaking* RS Raja Ampat merupakan salah satu kegiatan dalam rangka Asta Cita Presiden Prabowo pada bidang kesehatan yaitu melengkapi RSUD Kabupaten. Pada kesempatan ini dilakukan peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan RI bersama Gubernur Papua Barat Daya, Bupati kabupaten Raja Ampat dan Direktur RS Kabupaten Raja Ampat serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Catatan yang ingin disampaikan oleh BP3OKP Pokja Sehat mengenai **pentingnya melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pengadaan alat kesehatan sehingga benar-benar dapat bermanfaat dan tidak menjadi beban bagi operasionalisasi rumah sakit. pentingnya pula mempersiapkan sumber daya manusia bidang kesehatan yang nantinya akan menjadi operator pada kasus-kasus yang melibatkan penggunaan alkes tersebut. Hendaknya hibah alkes pada suatu daerah memperhitungkan data kasus kesehatan secara spesifik pada wilayah tersebut.**



01-02 Mei 2025 Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program Percepatan Misi Cerdas terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau



14 Mei 2025 Kegiatan Rapat Virtual bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan



19 Mei 2025 Kegiatan Lokakarya Internal Model Tetap Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH)



26-28 Mei 2025 Kegiatan Rapat Koordinasi Program Prioritas Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 serta Diskusi Kelompok Terumpun Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Tahun 2025 Region 2

Pokja Cerdas pada bulan April-Mei 2025 berkomitmen melakukan SHEK terhadap perencanaan pembangunan berbasis RIPPP. Pada Mei 2025 ini dikelompokkan menjadi 2 strategi pendampingan, yakni :

1. SHEK dalam rangka memastikan Program Percepatan Misi Papua Cerdas tertuang dalam Dokumen Perencanaan OPD : Pendampingan ke Kab/kota yang telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas pelaksanaan Quik Wins/Program percepatan perlu dipastikan komitmen Pemda agar tertuang dalam dokumen Perencanaannya tetapi juga Running. Khusus untuk SSH tidak hanya dilaksanakan pada kab Lokpri saja tetapi juga di Kabupaten Tambrau. Khusus untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat, tahun 2025 adalah PERLUASAN SSH, dari 1 Distrik menjadi 3 Distrik (3 Sekolah). Khusus kabupaten Tambrau, selain persiapan Running SSH tahun 2025, Pendidikan Berpola Asrama disiapkan untuk jenjang SMA sedangkan Program Sekolah Terbuka telah disosialisasikan kepada pimpinan OPD Teknis. SHEK kepada kab/kota tidak hanya melaksanakan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi tetapi juga Evaluasi, terutama perencanaan program kerja yang belum berbasis SPM.
2. SHEK dalam rangka Sinkronisasi Program Prioritas Kemendikdasmen RI dalam Kerangka RIPPP : Program Prioritas Kemendikdasmen dengan RIPPP telah disinkronisasi, hasilnya adalah SELARAS. Salah satunya adalah WAJAR (Wajib Belajar) 13 tahun ini selaras dengan Program pada RIPPP yakni Pengembangan PAUD; Satu Desa Satu PAUD, selain itu, Program Prioritas lainnya adalah Pendidikan Karakter, MBG dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan semua sejalan dengan RIPPP. Atas dasar inilah Pokja Cerdas merekomendasikan kepada OPD teknis agar memperhatikan RIPPP (Perpres 24 tahun 2023) dan Perpres 12 tahun 2025 sebagai dasar perencanaan Renstra OPD.

Khusus untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong Pokja melaksanakan SHEK dalam rangka pendampingan program prioritas Daerah yakni Sekolah Gratis. Pendampingan dilakukan untuk memastikan rencana penggunaan anggaran sesuai, begitu pula dengan target capaian dan target penerima. Kami menyuarakan pula tentang peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dengan berkordinasi secara rutin Bersama Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat.



# PAPUA PRODUKTIF



Pada tanggal **08 Mei 2025** di **Hotel Rylich Panorama Sorong**, BP3OKP PBD diundang dan terlibat dalam kegiatan ***Coffe Morning*** **Inisiasi dan Harmonisasi Rencana Program Peningkatan Pariwisata melalui Transportasi Udara di BLU Kantor UPBU Kelas I DEO**. Fokus utama diskusi Coffee Morning Inisiasi dan Harmonisasi Program Peningkatan Pariwisata Melalui Transportasi Udara adalah penguatan konektivitas udara sebagai pengungkit sektor pariwisata di Papua Barat Daya. Perlu upaya Integrasi jadwal penerbangan, promosi destinasi wisata, serta sinergi antara pemda, pengelola bandara, dan pelaku industri pariwisata, selain itu perlu juga disusun masterplan konektivitas pariwisata udara yang diselaraskan dengan rencana induk kepariwisataan di Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan pendekatan wilayah berbasis destinasi wisata unggulan (Raja Ampat ) dan destinasi wisata pendukung Kabupaten Sorong, Tambrau, Maybrat dan Sorong Selatan.



# PAPUA POLHUKAM/DAMAI



Pada tanggal **23 Mei 2025** di **Mako Polda Provinsi Papua Barat Daya**, BP3OKP PBD melaksanakan kegiatan **Audiensi bersama Kapolda Provinsi Papua Barat Daya**. BP3OKP Papua Barat Daya berkordinasi dalam rangka Penguatan Kolaborasi Ketertiban dan Keamanan Wilayah (Trantibmas) Bersama Kapolda Papua Barat Daya. Sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya memerlukan pendekatan humanis, preventif, dan partisipatif dalam menjaga ketertiban. Beberapa daerah di wilayah Papua Barat Daya memiliki karakteristik tingkat kerawanan yang memerlukan perhatian baik itu di wilayah Kota Sorong ataupun beberapa wilayah lainnya. Selain itu diperlukan alternatif program pemberdayaan pemuda dan edukasi hukum berbasis budaya lokal menjadi bagian dari strategi bersama.

# KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA



Pada tanggal **16-17 Mei 2025**, BP3OKP PBD diundang dan terlibat dalam kegiatan **Rapat Konsultasi Usulan Rencana Kerja SKALA Wilayah Papua 2025-2026**. Dalam kegiatan ini, BP3OKP Papua Barat Daya berperan aktif dan diperoleh gambaran terkait kemajuan rencana kerja 2024-2025 serta pemetaan prioritas kedepan program skala Provinsi Papua Barat Daya : [https://drive.google.com/file/d/1d-6QjTdY82holoSxpPmAR71Jb237vuYP/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1d-6QjTdY82holoSxpPmAR71Jb237vuYP/view?usp=drive_link)



Pada tanggal **19-21 Mei 2025**, BP3OKP PBD diundang dan terlibat dalam kegiatan **Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi Wilayah Papua**. Dalam kegiatan ini, BP3OKP Papua Barat Daya berperan aktif, yang menjadi catatan dalam kegiatan ini yaitu OPD dari Provinsi Papua Barat Daya tidak semua hadir, ketersediaan data dukung dari tiap OPD masih sangat kurang sehingga terkendala dalam penyusunan SPM sehingga, langkah yang perlu diambil oleh BP3OKP PBD adalah perlu melakukan koordinasi dengan Bapperida agar selanjutnya dapat menyelesaikan tahapan kegiatan finalisasi SPM.



Pada tanggal **06 Mei 2025**, BP3OKP PBD melaksanakan kegiatan **Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia**. Dalam kegiatan ini, BP3OKP Papua Barat Daya mendampingi Bupati Kabupaten Sorong Selatan untuk berkoordinasi terkait pengajuan kenaikan status jalan Atori-Haimaran-Moswaren-Teminabuan. Pembangunan jalan penghubung Hatori-Haimaran bernilai strategis untuk membuka isolasi wilayah pedalaman, sehingga perlu dilaksanakan proses percepatan legal dan teknis (pembebasan lahan, desain teknis, dan pengawasan). Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, jalan ini menjadi tulang punggung logistik dan akses layanan dasar bagi masyarakat adat di wilayah Sorong Selatan.



Pada tanggal **20 Mei 2025**, BP3OKP PBD melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama BPKP Provinsi Papua Barat Daya**. Dalam kegiatan ini, BP3OKP Papua Barat Daya memperkenalkan kelembagaan serta menyampaikan perihal kinerja yang telah dilakukan dalam kurun 1 tahun terakhir. Dalam kegiatan juga dilaksanakan diskusi terkait penyamaan persepsi sebagai tim yang nantinya akan bersama-sama melakukan kegiatan penguatan pada tata kelola pemerintahan mulai dari pengawasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pada berbagai bidang, utamanya bidang sesuai misi RIPP (Sehat, Cerdas, Produktif). Kedepan, BP3OKP PBD dan BPKP akan berkolaborasi dalam melaksanakan tugasnya.



Pada tanggal **19 Mei 2025**, BP3OKP PBD diundang dan terlibat dalam kegiatan **Desk RKPDP Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026**. Dalam pelaksanaan desk yang difasilitasi oleh Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, masih ditemukan beberapa hal seperti kurangnya pemahaman regulasi yang memberikan dampak pada pelaksanaan desk yang terkesan amburadul dan seadanya. Tidak terlihat kesiapan panitia melakukan kegiatan desk mengakibatkan waktu yang tidak efisien serta bertele-tele. Hal baik yang muncul dari desk kali ini adalah terlibatnya BP3OKP pada pembagian desk sehingga dapat terjadi koordinasi serta sinkronisasi terhadap perencanaan program yang disesuaikan dengan misi sehat, cerdas dan produktif. Potensi terjadinya overlapping dalam merencanakan kegiatan masih terdapat pada beberapa OPD yang disarankan untuk menjadikannya sebagai Program Strategis Daerah sebagai upaya melaksanakan pembangunan secara tematik dan memungkinkan terjadinya share biaya sebagai upaya efisiensi.

# KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA



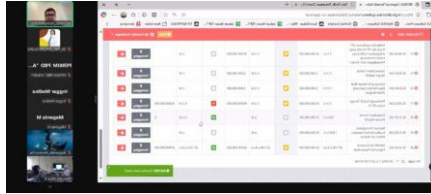
**06 Mei 2025 Kegiatan Konsultasi Publik  
Penyusunan Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Maybrat Tahun 2025-2029**



**15 Mei 2025 Kegiatan Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  
Otsus dan RKPD Tahun 2026 Provinsi  
Papua Barat Daya**



**21 Mei 2025 Kegiatan Presentasi Pimpinan  
OPD Kabupaten Sorong Selatan**



**28 Mei 2025 Kegiatan Desk Tematik  
Kewilayahan Musrenbangnas Tahun 2025**



**28 Mei 2025 Kegiatan Konsultasi Publik  
Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya  
Tahun 2025-2029**

BP3OKP Papua Barat Daya sebagai badan pengarah percepatan pembangunan di Papua memiliki peran strategis dalam memberikan arahan dengan tujuan mensinkronisasikan arah kebijakan. Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi pemekaran memiliki tantangan dan peluang dalam merumuskan arah pembangunan yang terencana, partisipatif, dan sesuai karakteristik daerah. Untuk itu, proses perencanaan jangka menengah dan tahunan harus diselenggarakan secara substansial dan teknis melalui tiga komponen utama yaitu Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2026, dan Desk RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026. Konsultasi Publik Ranwal RPJMD 2025–2029 merupakan tahap awal perumusan arah pembangunan lima tahunan berdasarkan visi-misi kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD menjadi rambu utama dalam penyusunan RKPD tahunan, termasuk RKPD 2026. Konsultasi publik memastikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat diakomodasi sejak awal, selain itu penyelarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan baik itu RIPP, RPJMN serta dokumen lain yang beririsan menjadi acuan utama yang perlu disinkronisasikan. Pendampingan oleh BP3OKP Papua Barat Daya dilakukan secara berjenjang baik pada level Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Pada level kabupaten, Maybrat dan Sorong Selatan menjadi role model pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan. Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD 2026 menjadi bagian penting dalam proses integrasi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Forum musyawarah Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD 2026 merupakan forum yang bertujuan menyepakati program prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026, selain itu Musrenbang Otsus menekankan pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus secara terarah dan akuntabel, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD 2026 juga merupakan proses translasional dari RPJMD ke dalam bentuk program konkret tahunan. Desk RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 merupakan tahap lanjutan yang bersifat teknokratik dan verifikatif setelah Musrenbang. Desk RKPD digunakan untuk menyelaraskan usulan program/kegiatan antara OPD, kabupaten/kota, dan sumber pendanaan, serta memastikan kesesuaian kegiatan dengan indikator kinerja, target RPJMD, dan plafon anggaran.

Salah satu temuan pada saat konsultasi public RPJMD kabupaten Maybrat untuk misi Papua Sehat, Pokja Sehat mengidentifikasi bahwa Kabupaten Maybrat memiliki tantangan pembangunan bidang kesehatan yang sangat besar karena masih banyak kekurangan dalam hal sumber daya manusia kesehatan maupun dalam hal sarana dan prasarana kesehatan yang belum pula didukung dengan infrastruktur yang baik. Perlu dilakukan perencanaan secara komprehensif dan memperhatikan kondisi geografis dan faktor polhukam.

BP3OKP Papua Barat Daya memiliki peran dalam proses terutama memberikan arahan dan mengawal siklus perencanaan pembangunan daerah baik itu RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, Musrenbang Otsus serta Desk RKPD. Sinkronisasikan antara arah strategis (RPJMD), kebijakan tahunan (RKPD), serta pendanaan khusus (Dana Otsus) akan memperkuat efektivitas pembangunan, mempercepat pelayanan publik, dan memastikan jalur proses perencanaan yang tepat untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat Daya yang mandiri, adil dan sejahtera.

## Capaian & Rekomendasi

A large collage of photographs arranged in a triangular shape, pointing towards the top right. The photos depict various professional activities:
 

- Top left: A group of people in a meeting around a round table.
- Top right: A person sitting on a yellow sofa.
- Middle left: A large group of people standing together for a group photo in a hall.
- Middle center: A group of people in white uniforms standing in a line outdoors.
- Middle right: A group of people in white uniforms standing in a line indoors.
- Bottom left: A group of people sitting at a long table in a meeting.
- Bottom center: A group of people sitting at a table with a red tablecloth.
- Bottom right: A group of people standing in front of a banner that reads "PENGANTARAN TUGAS DAN KARYA MURAHABAH DAYA AYAT TAAH AUHAY".
- Bottom left corner: A person working at a desk with a laptop.
- Bottom center-left: A screenshot of a software interface with a table of data.
- Bottom center-right: A person presenting a framed certificate to another person.
- Bottom right corner: A group of people working at desks with laptops.



# CAPAIAN

Pada bulan Mei 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya mencatat sejumlah capaian kinerja strategis melalui pelaksanaan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi), khususnya dalam penguatan perencanaan daerah, koordinasi strategis sesuai misi percepatan pembangunan, serta pengawasan dan harmonisasi lintas sektor.

Beberapa capaian BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Mei 2025 antara lain :

## 1. Koordinasi Strategis Program Percepatan

- Melaksanakan pendampingan terhadap Dinas Pendidikan dan Pemda Kabupaten Tambrau terkait program percepatan misi Papua Cerdas Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), Sekolah Berpola Asrama maupun Sekolah Terbuka.
- Penguatan dukungan terhadap program pendidikan afirmatif di Kabupaten Sorong Selatan dan penyusunan model tetap program SSH.
- Sinkronisasi program melalui kehadiran dalam upacara hardiknas di Kabupaten Tambrau, Musrenbang Otsus dan RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.
- Terlibat dalam Rakerkesda Kabupaten Tambrau untuk sinkronisasi program kesehatan dengan RIPPP.
- Mengawal pembangunan RSUD Raja Ampat melalui kegiatan groundbreaking, serta kunjungan lapangan ke RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan.
- Mendorong pembentukan pelayanan kesehatan berjalan (Mobile Health Service) sesuai program percepatan misi Papua Sehat dalam RIPPP.
- Inisiasi program peningkatan pariwisata melalui transportasi udara dan pengembangan Bandara DEO Sorong (rencana rute baru Labuan Bajo-Sorong).

## 2. Penguatan Perencanaan Daerah

- Terlibat, memberikan review serta masukan terhadap forum strategis perencanaan musrenbang otsus dan RKPD PBD Tahun 2026 serta konsultasi public terkait dokumen RPJMD Kabupaten Tambrau dan Provinsi Papua Barat Daya.
- Mendorong integrasi indikator RIPPP dan program unggulan Presiden dalam RPJMD Daerah.
- Terlibat dalam kegiatan SKALA di Makassar dan penyusunan rencana aksi SPM untuk wilayah Papua.
- Mendorong integrasi sistem informasi daerah dan satu data.

## 3. Pengawasan dan Harmonisasi Lintas Sektor

- Melakukan koordinasi lintas lembaga dengan Kementerian PU (Dirjen Bina Marga), BPKP PBD, Pangdam Jaya dan Kemenhan guna pembangunan sinergitas serta untuk mendukung realisasi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, realisasi infrastruktur, penguatan pengawasan dan sinergi lintas sektor.



# REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umum berdasarkan capaian antara lain :

1. Penguatan literasi regulasi di kalangan OPD daerah agar selaras dengan RIPPP dan program nasional.
2. Optimalisasi koordinasi antar-OPD untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat efektivitas perencanaan.
3. Evaluasi pelaksanaan Musrenbang agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.



**Penutup**

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua**  
Periode Bulan **Mei 2025** **Badan Pengarah Percepatan Pembangunan**  
**Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya.**

